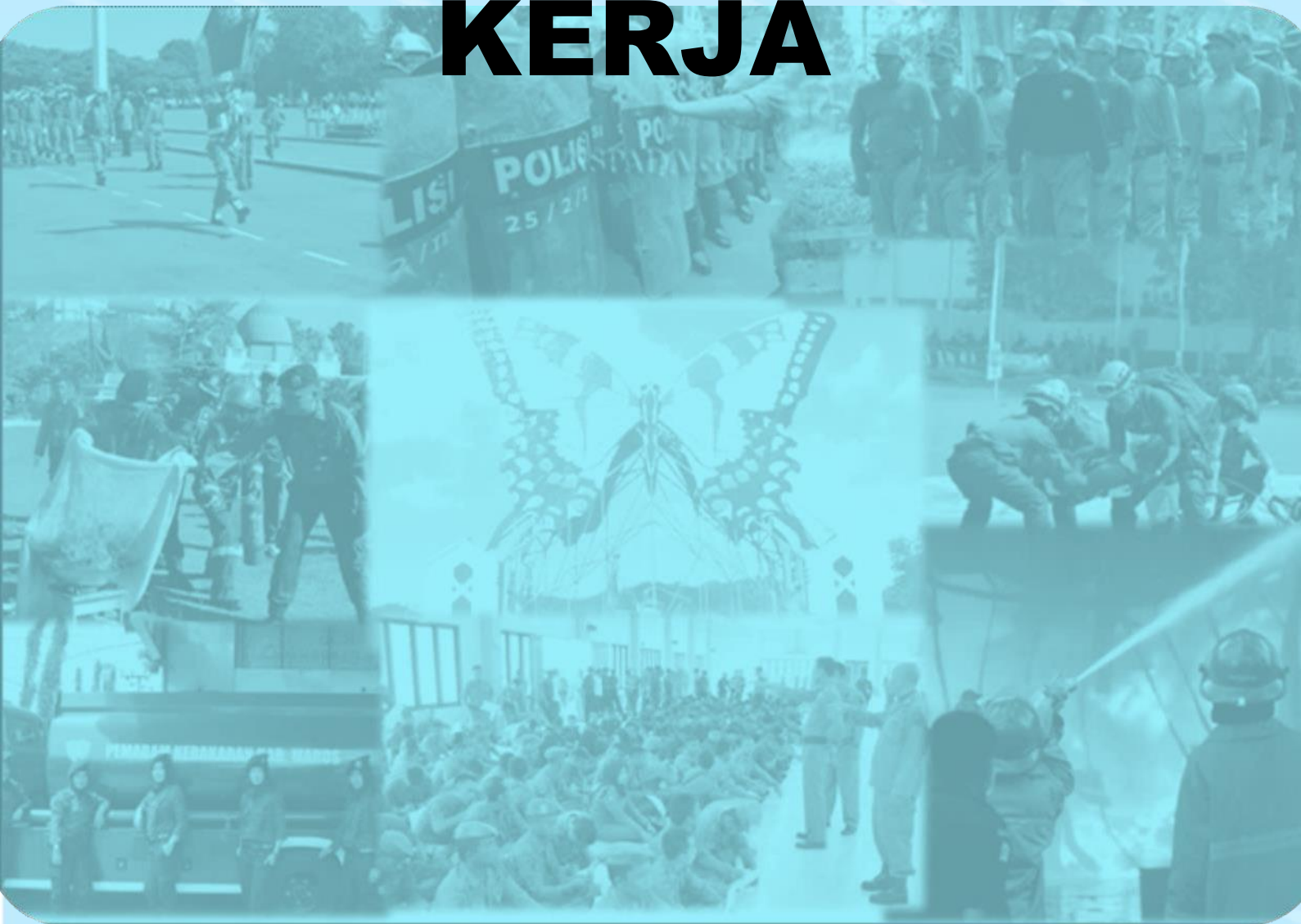




RENCANA KERJA



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunianya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Maros dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan serangkaian rencana kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yaitu sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros.

Perencanaan kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu perlu dukungan oleh seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Kerja (RENJA) ini untuk Tahun Anggaran 2022. Dan disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan materi didalamnya, sehingga usul dan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan sangat diperlukan.

Akhirnya atas Rahmat dan Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa jualah kita semua berdo'a dan berupaya agar Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat diimplementasikan dengan baik.

Maros, 02 Juli 2021

PIC. KEPALA SATUAN,



TOWADENG, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19690328 199703 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2022 merupakan rencana tahunan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan di daerah disusun oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan yaitu Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah maupun Perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tertuang pada pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,

Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan tahunan, penyusunannya senantiasa memperhatikan seluruh Aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 telah disusun sesuai mekanisme dan alur Penyusunan dokumen Perencanaan di atas. Renja SKPD merupakan dokumen Rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun operasionalisasi RKPD harus disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana kerja ini merupakan bentuk operasionalisasi dan pedoman bagi pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022.

Idealnya, diharapkan dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Maros Tahun 2022 ini, akan tercipta kinerja yang lebih baik sesuai dengan rencana yang telah disusun, sesuai dengan arahan, sehingga pada akhir pelaksanaan kegiatan diharapkan apa yang menjadi Tujuan dan Sasaran kegiatan dapat tercapai secara maksimal, dengan demikian tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros akan dapat terwujud.

Akselerasi peningkatan kinerja dapat dicapai bila rencana yang disusun dilaksanakan dengan konsisten dan adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama yang optimal dari seluruh unsur pelaksana rencana tersebut.

Wujud dari konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja akan terlihat pada Implementasi setiap item perencanaan yang direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selisih antara harapan dan kenyataan tidak jarang akan dijumpai dalam pelaksanaannya.

Akhirnya dibutuhkan pula kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan Global, Regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam realisasi Rencana Kerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
46. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 47. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
 48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
 50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

- Selatan Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
 52. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
 54. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 8);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 6);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 6);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5)
66. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 2);
67. Peraturan Bupati Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022 dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2022. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di kabupaten sehingga terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan dan juga merupakan :

- a. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2022.
- b. Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros 2022.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan rencana kerja PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD,

review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, dan program dan kegiatan PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif PD.

BAB V. P E N U T U P

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros mampu melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan Realisasi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2021 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 terkait dengan Standar Pelayanan Minimal, serta mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2022 salah satu diantaranya adalah sebagaimana tercantum pada pasal 12 adalah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

- ✓ Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- ✓ Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis;
- ✓ Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan;
- ✓ Adanya ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan

sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

- ✓ Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kabupaten Maros sebagai daerah penyangga ibu kota dan berada pada jalur lintas untuk beberapa Kabupaten/kota;
- ✓ Letak geografis Kabupaten maros, yakni beberapa desa yang sulit untuk dijangkau secara cepat sehingga dalam penanganan Bencana Khususnya Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami kendala;
- ✓ Adanya intervensi masyarakat terhadap tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2016 – 2021, maka strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan dengan metode analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, dan Threats/Tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis, indentifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Strengths/Kekuatan :

Pengembangan kualitas internal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Dengan berkembangnya kualitas dan kompleksitas permasalahan Kabupaten maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros juga harus meningkatkan kualitas sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Rasio jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan luas wilayah dan jumlah perda Perkada yang harus ditegakkan bisa diantisipasi melalui pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) dan Relawan Kebakaran (Redkar) yang akan di bentuk di 103 desa/keluarahan se-Kabupaten Maros. Selain kuantitas, kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan juga harus ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Weaknesses/Kelemahan :

- a. Kurangnya data dan informasi serta koordinasi antar instansi terkait.
- b. Masih kurangnya kualitas/SDM aparatur.
- c. Seringnya terjadi perubahan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga perlunya pemahaman yang up to date.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
- e. Belum dapat memenuhinya ketersediaan dana yang ada dalam memenuhi semua tuntutan pembangunan ataupun pemeliharaan.
- f. Kurangnya motivasi kerja dari aparatur.

Opportunities/Peluang :

- a. Adanya komitmen pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif dalam mengawal kebijakan.
- b. Perubahan paradigma masyarakat, dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
- d. Kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan Kabupaten yang tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik antar lembaga di dalam pemerintah Kabupaten Maros maupun dengan Lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik. Dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan jajaran samping sebagai perbantuan dalam proses penegakan

- e. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- f. Perkembangan Informasi dan Teknologi (IT).

Threats/Ancaman :

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Trantibum Linmas.
- b. Belum optimalnya pelaksanaan komitmen dan konsistensi kebijakan.
- c. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
- d. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur dan konsultasi berdasarkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT.

Maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengaturan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Trantibum Linmas. Strategi yang digunakan dengan meningkatkan kualitas/kwantitas SDM melalui bimtek/diklat dan sarana (menambah peralatan /perlengkapan).
2. Melakukan Peningkatan sarana prasarana penunjang para pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan di lapangan.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
4. Peningkatan Pelayanan Secara Prima Serta Menciptakan Masyarakat Yang Tenram dan Tertib Dalam Aspek Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Serta Perlindungan Masyarakat Dan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran.

Agar Strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan maka ditetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .
2. Menyediakan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
3. Menyediakan peralatan dan sarana yang lengkap demi mendukung kegiatan di lapangan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kantor.
5. Meningkatkan SDM dengan mengikuti berbagai Diklat Teknik dan Profesional serta memberikan kesempatan peningkatan Pendidikan Formal.
6. Melakukan updating data dan informasi melalui komputerisasi dan transparan terhadap informasi publik.
7. Meningkatkan sarana transportasi dalam menunjang aksesibilitas Aparatur Satpol, Damkar dan Penyelamatan.
8. Peningkatan pembangunan sarana drainase dan gorong-gorong.
9. Meningkatkan pengembangan jaringan irigasi rawa dan pengairan.
10. Meningkatkan kelancaran saluran menuju sungai.
11. Menyediakan fasilitas pendukung untuk menunjang kegiatan.
12. Melakukan kontrol terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan.
13. Menyusun Perencanaan yang ramah lingkungan.
14. Adanya peningkatan pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur yang telah terbangun.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Peraturan Bupati Maros Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Permasalahan umum yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran dari bidang-bidang masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/ kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah.
3. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Gedung kantor sebagai pusat pengendali pelaksanaan kegiatanpun sangat tidak representatif. Karena luasan gedung kantor tidak mampu menampung jumlah pegawai yang mencapai 688 lebih orang. Kemudian sarana penunjang lainnya seperti kendaraan dinas operasional juga belum memenuhi kebutuhan Satuan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai pelaksana bidang Trantibum Linmas, maka diharapkan dengan adanya prasarana dan sarana sebagaimana daftar diatas, sesungguhnya belum dapat dikategorikan memenuhi kebutuhan dinas. Peningkatan dalam penyediaan sarana dan pemeliharaan terhadap sarana yang sudah ada perlu diprogramkan secara rutin. Diharapkan hal tersebut bukanlah menjadi alasan dikarenakan kekurangan prasarana dan sarana dijadikan alasan/dasar dalam pencapaian kinerja.
4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi dalam dan luar daerah.

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2021-2023 sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN (IMPACT)						
			TOLOK UKUR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -					SATUAN
				1	2	3	4	5	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	BB	BB	A	Nilai SAKIP
			Nilai Kapasitas Organisasi	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai survey internal
2	Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100	Persen
			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup	100	100	100	100	100	Persen
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran	Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15	Menit
			Cakupan pelayanan kebakaran/Non Kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran	75,81	80.50	85.50	90.50	95.50	Persen

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Untuk dapat lebih memfokuskan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam pencapaian Visi Misi secara Efektif dan Efisien perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam Organisasi serta Situasi dan Kondisi.

Upaya peningkatan ketertiban umum dalam Wilayah Kabupaten Maros diperlukan usaha-usaha Strategis yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berorientasi kepada terciptanya Rasa Aman dalam melakukan Aktifitas keseharian.

Melihat kondisi masyarakat yang semakin plural akibat letak Geografis Kabupaten Maros yang menjadi Penyangga Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi Poros Trans ke beberapa Kabupaten diwilayah utara Sulawesi Selatan sangat rentan dengan pengaruh perubahan kehidupan Kota.

Pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dapat diidentifikasi Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi yaitu;

- 2.3.1. Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros sebagian besar masih SLTA/SMU atau Sederajat dan direkrut dari PNS yang Notabene secara teknis kurang memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Penegak PERDA.
- 2.3.2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan Operasional dilapangan,
- 2.3.3. Belum semua Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memenuhi standar kualifikasi,
- 2.3.4. Masih rendahnya peran serta secara aktif dan kesadaran masyarakat dalam hal Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

- 2.3.5. Kondisi Kabupaten Maros yang secara Geografis terdiri dari Wilayah pegunungan dan pesisir serta 14 kecamatan yang menyebabkan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Maros secara Maksimal dan Efektif,
- 2.3.6. Keterbatasan dana Operasional untuk Kegiatan pengendalian Keamanan, Ketertiban, Linmas dan kenyamanan lingkungan diseluruh Wilayah Kabupaten Maros.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah maupun Masyarakat untuk aktif secara bersama-sama mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 berkaitan dengan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan hasil Analisis kebutuhan terdapat pada rancangan Awal RKPD Tahun 2022 dan Rancangan Akhir Tahun 2022 Hal ini berdasarkan atas hasil analisis kebutuhan akan adanya Peraturan Daerah Perencanaan dan Penganggaran guna meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

Belum adanya regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah yang Menjabarkan Peraturan Perencanaan di daerah, hal ini disadari merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan adanya perbedaan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD tetap menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD sampai dengan RKPD hingga Renja SKPD.

Reviuw terhadap rancangan Awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 2.3
Review terhadap rancangan awal RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	RANCANGAN AWAL RKPD								HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.697.489.674	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.804.000.000	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.900.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Dokumen	36.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.900.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.000.000	
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	5.000.000	
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	5.000.000	
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Kab Maros, Turika	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-	Kab Maros, Turikale,	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang dibuat	1 Dokumen	5.000.000	

	SKPD	le, Pettua dae				SKPD	Pettuada e			
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettua dae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangdibuat	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuada e	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangdibuat	6 Dokumen	5.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Maros, Turikale, Pettua dae	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Maros, Turikale, Pettuada e	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	10.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.388.071.564	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				178.000.000
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Maros, Turikale, Pettua dae	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.252.305.564	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Maros, Turikale, Pettuada e	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	8.000.000
03	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettua dae	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	108.350.000	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuada e	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	120.000.000
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettua dae	Jumlah Dokumen SPJ Pelaksanaan Kegiatan	48 Dokumen	4.226.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuada e	Jumlah Dokumen SPJ Pelaksanaan Kegiatan	48 Dokumen	10.000.000

05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Tahun	5.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Tahun	10.000.000
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dibuat	6 Dokumen	8.610.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang dibuat	6 Dokumen	15.000.000
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Analisis Raelisasi Anggaran	12 Bulan	8.830.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Analisis Raelisasi Anggaran	12 Bulan	15.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				294.680.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				400.000.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah (Jenis) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Jenis	189.680.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah (Jenis) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Jenis	250.000.000
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	3 Jenis	105.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	3 Jenis	150.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				436.238.110	Administrasi Umum Perangkat Daerah				570.000.000
01	Penyediaan Komponen Instalasi	Kab Maros, Turikale	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7 Jenis	13.402.110	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kab Maros, Turikale	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7 Jenis	20.000.000

	Listrik/Penarangan Bangunan Kantor	le, Pettuadae	Bangunan Kantor yang dibeli			Bangunan Kantor	Pettuadae	Bangunan Kantor yang dibeli		
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	2 Jenis	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	2 Jenis	100.000.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	22 Jenis	13.648.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	22 Jenis	20.000.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	31 Jenis	53.040.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	31 Jenis	80.000.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 Jenis	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5 Jenis	50.000.000
07	Pebyediaan Bahan/Material	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Bahan/Material yang tersedia	10 Jenis	24.658.000	Pebyediaan Bahan/Material	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Bahan/Material yang tersedia	10 Jenis	50.000.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Fasilitas tamu	2 Jenis	226.490.000	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jenis Fasilitas tamu	2 Jenis	250.000.000

	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.600.000	Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah				620.000.000
02	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jasa Komonikasi Sumber daya air dan Listrik yang tersedia	1 Jenis	10.000.000	Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Jasa Komonikasi Sumber daya air dan Listrik yang tersedia	1 Jenis	20.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum kantor yang tersedia	4 Jenis	543.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum kantor yang tersedia	4 Jenis	600.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				3.937.833.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.575.000.000
	PenangananGangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.868.358.000	PenangananGangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4.505.000.000
01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan (patrol) Ketentraman dan Ketertiban Umum	360 Kali	3.656.420.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan (patrol) Ketentraman dan Ketertiban Umum	360 Kali	4.000.000.000

	Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan					Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan				
02	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban	25 Kali	103.060.000	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan PERDA dan PERKADA melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban	25 Kali	120.000.000
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental	3 Kali	15.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental	3 Kali	
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Pelaksanaan Jambore Sat Pol-PP Tingkat Provinsi	1 Kali	90.248.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab Maros, Turikale, Pettuadade	Jumlah Pelaksanaan Jambore Sat Pol-PP Tingkat Provinsi	1 Kali	110.000.000

07	Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Operasi Yustisi dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	4 Kali	230.000	Kerja sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Operasi Yustisi dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	4 Kali	250.000.000
09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	8 Dokumen	3.400.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	8 Dokumen	5.000.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Perayuran Bupati/Walia Kota				32.026.000	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Perayuran Bupati/Walia Kota				40.000.000
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan PERDA dan PERBUP	3 Kali	14.487.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan PERDA dan PERBUP	3 Kali	20.000.000
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PERDA dan PERBUP	12 Kali	3.839.000	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PERDA dan PERBUP	12 Kali	5.000.000

03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERBUP yang tertangani	20 Kasus	13.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pelanggaran PERDA dan PERBUP yang tertangani	20 Kasus	15.000.000
	Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				27.449.000	Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				30.000.000
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Aparat yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5 Orang	27.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Aparat yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5 Orang	30.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYALAMATAN NON KEBAKARAN				1.899.357.000	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYALAMATAN NON KEBAKARAN				6.097.000.000
	Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyalamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya				1.840.130.000	Pencegahan Pengendalian Pemadaman, Penyalamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan				2.031.000.000

	dan Beracum Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Beracum Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pencegahan Kebakaran	2 Kali	16.330.000	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pencegahan Kebakaran	2 Kali	20.000.000
02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	250 Kejadian	1.815.100.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	250 Kejadian	2.000.000.000
03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100 Kejadian	8.700.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100 Kejadian	129.000.000
	Inspaksi Peralatan Proteksi Kebakaran				32.458.000	Inspaksi Peralatan Proteksi Kebakaran				81.000.000

01	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah (Pemeliharaan) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang Mamadai	20 Instansi/Kebakaran	15.548.000	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah (Pemeliharaan) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang Mamadai	20 Instansi/Kebakaran	32.000.000
02	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah(Jenis) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dalam Kondisi baik	32 Jenis	17.000.000	Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah(Jenis) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran dalam Kondisi baik	32 Jenis	49.000.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran				9.979.000	Investigasi Kejadian Kebakaran				40.000.000
01	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	20 Kasus	9.979.000	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	20 Kasus	15.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				16.700.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
01	Pembardayaan Masyrakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang	16.700.000	Pembardayaan Masyrakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang	20.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros telah menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

<p style="text-align: center;">Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab</p>
--

KODE					TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				12.524.679.674		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6.697.489.674		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.900.000		
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di buat	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	3 Dokumen	4.900.000	APBD	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	

				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000 -	APBD	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	6 Dokumen	7.500.000	APBD	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.388.071.564	APBD	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	1 Tahun	5.252.305.564	APBD	
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	11 Bulan	108.350.000	APBD	

				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Pelaksanaan Kegiatan	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	48 Dokumen	4.226.000	APBD	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	1 Tahun	5.750.000	APBD	
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang dibuat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	6 Dokumen	10.000	APBD	
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	12 Bulan	8.830.000	APBD	
1	05	01	2.05		Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah				294.680.000	APBD	
				02	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah	Kab	3	189.680.000	APBD	

					Beserta Atribut Kelengkapannya	(Jenis) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Maros, Turikale, Pettuadae	Jenis			
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	3 Jenis	105.000.000	APBD	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkap Daerah				436.238.110	APBD	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Intstalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	7 Jenis	13.402.110	APBD	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	Kab Maros, Tur	2 Jenis	80.000.000	APBD	

						Peralatan Perlengkap an Kantor yang dibeli	ikale, Pettuadae				
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peral atan Ruam ah tangg a	Kab Maros,Tur ikale, Pettuadae	22 Jenis	13.648.000	APBD	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	Kab Maros,Tur ikale, Pettuadae	31 Jenis	53.040.000	APBD	
				05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Kab Maros,Tur ikale, Pettuadae	5 Jenis	25.000.000	APBD	
				07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan / Material yang Tersedia	Kab Maros,Tur ikale, Pettuadae	10 Jenis	24.658.000	APBD	
				08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitas	Kab Maros,Tur ikale,	2 Jenis	226.490.000	APBD	

						Tamu	Pettuadae				
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.600.000	APBD	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	1 Jenis	10.000.000	APBD	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan	4 Jenis	543.600.000	APBD	
1	05	02			Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum				3.927.833.000	APBD	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.868.358.000	APBD	
				01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Gangguan (Patroli) Ketentraman dan	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	360 Kali	3.656.420.000	APBD	

						Ketertiban Umum					
				02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusushan massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenraman dan Ketertiban yang tertangani	Kab Maros, Tur ikale, Pettuadae	25 Kali	103.060.000	APBD	
				04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Anggota Sat.Linmas	Kab Maros, Tur ikale, Pettuadae	3 Kali	15.000.000	APBD	
				05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pelaksanaan Jambore Sat.Pol-PP Tingkat Provinsi	Kab Maros, Tur ikale, Pettuadae	1 Kali	90.248.000	APBD	
				07	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Operasi Yustisi Dalam Pencegahan	Kab Maros, Tur ikale, Pettuadae	4 Kali	230.000	APBD	

						dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban					
				09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban dan Ketenraman Masyarakat	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	8 Dokumen	3.400.000	APBD	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				32.026.000	APBD	
				01	Sosialisai Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	3 Kali	14.487.000	APBD	
				02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan perturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	12 Kali	3.839.000	APBD	

						Perbup					
				03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelanggaran Perda / Perbup yang tertangani	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	20 Kasus	13.700.000		APBD
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				27.449.000		APBD
				01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Apartur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	5 Orang	27.449.000		APBD
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANAGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.899.357.000		APBD
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.840.130.000		APBD

				01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pencegahan Kebakaran	Kab. Maros Semua Kecamatan dan	2 Kali	16.330.000	APBD	
				02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabuptaen/Kota	Terlaksananya Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	250 Kejadian	1.815.100.000	APBD	
				03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	100 Kejadian	8.700.000	APBD	
1	05	04	0.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				32.548.000	APBD	
				01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Pemeriksaan) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	20 instansi / Perusahaan	15.548.000	APBD	

						yang memadai					
				02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Jenis) Sarana dan Prasarana Proteksi kebakaran dalam kondisi baik	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	32 Jenis	17.000.000		APBD
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran				9.979.000		APBD
				01	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	20 Kasus	9.979.000		APBD
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				16.700.000		APBD
				01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi mengenai Pencegahan dan Penanggulan	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	200 Orang	16.700.000		APBD

							gan Kebakaran					
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap arah kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Maros.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Penjabaran dari Visi adalah Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju berarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dapat dijabarkan dengan menelaah sasaran utama RPJMN 2020-2024. Sementara sasaran utama pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada visi misi pemerintah, strategi pembangunan nasional serta agenda prioritas pembangunan nasional.

Visi Pemerintah untuk tahun 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”***. Visi ini kemudian diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan prinsip dasar pembangunan nasional meliputi:

1. Membangun Kemandirian.

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan.

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Menjaga Keberlanjutan.

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti

Agenda prioritas Pembangunan Nasional dikenal dengan Nawa Cita Kedua, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan

- Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	<p>MENDORONG TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DIDAERAH</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas,serta Aparat dan Kelembagaan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran termasuk Penyediaan Layanan dasar Sesuai SPM.</p>	<p>Masih Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan SatLinmas yang diakibatkan Oleh Rendahnya Kompetensi Aparatur yang belum sepenuhnya Profesional Khususnya dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas tekhnis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengatahuan dan Keterampilan Personil Masih Kurang, - Penempatan Personil yang Belum sesuai dengan Kebutuhan - Motivasi Kerja dan Penguasaan Bidang Tugas yang masih Rendah - Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kerja masih Terbatas, - Masih Kurangnya Perhatian Terhadap Pelaksanaan Diklat Keterampilan bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 	<ul style="list-style-type: none"> -Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros -Dokumen Program/Kegiatan dari Instansi terkait Guna Terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
2	Mewujudkan Supramasi Hukum	Kurangnya Peran Aktip dari Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Hal Menagakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan-Kebijakan Daerah yang telah ada.	Kurangnya Koordinasi Berupa Sosialisasi, Peyuluhan Kepada Masyarakat Menganai PERDA dan Kebijakan Lainnya	PP NO 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.	Masih banyaknya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Belum Memahami dan Menguasai Teknis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sehingga Menimbulkan Image yang kurang baik ditengah Masyarakat akan Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.	-Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Oleh Anggotanya masih banyak yang belum sesuai dengan Protap yang benar. -Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang Refrensentatif dan Mamadai.	Terjalinnnya Koordinasi dan Hubungan yang Kuat dan baik terhadap Istansi yang Terkait Baik Instansi Vertikal maupun Sesama Instansi Otonomi Daerah.
4	Meningkatnya Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Beberapa Isu yang ada yang rentang terhadap terjadinya Gejolak di tengah Masyarakat Mis; Isu mengenai Ketenagakerjaan, Isu Mengenai Pilkada/Pemilu Legeslatif, Kenaikan BBM, Isu Sosial. Budaya/Sosial/Agama/Terrorisme dll.	Masih rendahnya tingkat Antisipasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam Mengantisipasi terjadinya Gejolak-Gejolak Sosial ditengah Masyarakat	Terdapat beberapa kearifan local yang dapat berdampakkepada pencegahan terhadap terjadinya gejolak Sosial Mis; "SIRI NAPACCE SIPAKAINGE SIPAKARAJA dll.

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
5	Meningkatnya Perlindungan Kehidupan Bermasyarakat	Terjadinya Perubahan secara fungsi Seqnopikan mengenai Fungsi dari kelembagaan Perlindungan Masyarakat yang tadinya berada dikesbangpol beralih ke Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penyesuaian terhadap Pelaksanaan Pungsi Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dibentuknya Satuan Perlindungan Masyarakat yakni Sebanyak 5.876 Anggota Linmas yang tersebar 103 Desa/Kelurahan.
STRUKTUR RUANG				
1	Peningkatan Pusat Kegiatan Nasional Mamminasata(di Wilayah Kabupaten Maros)	Sarana Prasarana Pendukung tugas Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat masih sangat terbatas	Belum adanya kebijakan mengenai Pengamanan Wilayah Mamminasata	Dikerahkannya Patroli Keamanan dan Ketentraman Lingkungan sampai diperbatasan Wilayah Perbatasan
2	Lokal Peningkatan Pusat Promosi(PKLP)	Kurangnya Koordinasi antara OPD Pelaksana Teknis dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang berkaitan dengan fungsi yang berkaitan dengan pusat Kegiatan Lokal Promosi	Dalam Kajian Penetapan Pusat Kegiatan local promosi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak dilibatkan secara Teknis	Adanya PERDA tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA K/L	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
3	<p>Pengembangan Pusat</p> <p>Pelayanan Kawasan(PPK)</p>	Belum terpetaknya Area yang menjadi Pusat Pelayanan Kawasan	Jalur Koordinasi yang Kurang berjalan dengan baik Antara Skateholder Terkait	Petunjuk dan Arahan Pimpinan Daerah dalam Upaya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Umum, Khususnya Wilayah Wilayah Pusat Kawasa yang ada Kabupaten Maros
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan	Sarana Prasarana Penunjang yang Masih dalam Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan Pelayanan Keamanan	Banyaknya Tambang-Tambang Ilegal yang Beroperasi di Wilayah Kabupaten Maros	Semangat dan Keinginan Besar Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam Menjaga Kawasan Lingkungan(PPL) Serta Dukungan Peraturan Daerah tentang Kawasan Lingkungan.
5	Terwujudnya Sistem Transportasi Kabupaten	Instansi Kurang Berkoordinasi dalam pelaksanaan Perwujudan Sistem Transportasi	Luasnya Wilayah Kabupaten Maros yang belum terpetak dalam hal jalur-jalur	Keikutsertaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

			system transportasi	Kebakaran dan Penyelamatan dalam Pengawasan Pengendalian jalur Transportasi berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum
--	--	--	---------------------	---

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULSEL	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
KAWASAN LINDUNG				
1a	Kawasan yang memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Pelaksanaan Tugas	Wilayah Kabupaten Maros yang Sangat Luas	Terbentuknya SatLinmas Sebanyak 103 Desa/Kelurahan
2	Kawasan Perlindungan Setempat	Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Pelaksanaan Tugas	Wilayah Kabupaten Maros Sangat Luas	Terbentuknya SatLinmas sebanyak 103 Desa/Kelurahan
3	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Cagar Budaya	Kewenangan Pemerintah Pusat	Tidak diketahuinya Wilaya-Wilayah yang Menjadi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Cagar Budaya	Dilaksanakannya Patroli Keamanan Lingkungan terkait Kawasan- Kawasan yang Menjadi Kawasan Pelestarian dan Kawasan Cagar Budaya

4	Kawasan rawan Bencana Alam	Belum Adanya peta Pengawasan rawan Bencana yang menjadi Acuan dalam Pelaksanaan Tugas	Letak Geografis Kabupaten Maros serta masih Wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dalam waktu Cepat terkait dengan Wilayah Manajemen Kebakaran(WMK)	Bergabungnya Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Pendorong kuat dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pencegahan serta Pertolongan dalam Musibah Bencana
5	Kawasan Lindung Geologi	Minimnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Tugas	Wilayah Kabupaten Maros yang sangat Luas	Ditematkannya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Wilayah yang menjadi Kawasan Lindung Geologi
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Banyaknya Wilayah yang Menjadi Pusat Pertambangan Ilegal	Adanya bakingdari Petinggi-Petinggi Instansi lain yang menghambat pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros	Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam Penegakan Peraturan Daerah menjadi Pajung Hukum yang tegas dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta serta sebagai jawaban atas Isu-Isu Strategis daerah dan Permasalahan Pembangunan daerah yang sedang dihadapi. Adapun

Tujuan yang ingin dicapai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros berdasarkan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selanjutnya arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

Sasaran 1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

1. Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan lingkup Satuan Polisi Pamong

Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

2. Pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
3. Penyusunan rencana program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
5. Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
6. Pembinaan pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
7. Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan akuntansi, urusan penatausahaan BMD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
8. Penyusunan pelaporan keuangan dan BMD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
9. Pengelolaan administrasi pimpinan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Sasaran 2. Meningkatkan Kualitas Penegakan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

1. standar operasional prosedur Satpol PP
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan

Perkada.

Sasaran 3 . Meningkatkan Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran

1. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Peningkatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran/Non kebakaran.
3. Penanganan Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Kabupaten Maros.
4. Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman.
5. Peningkatan Pelayanan Evakuasi dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran.
6. Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
7. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
8. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2022

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tahun 2022 disamping mempertimbangkan kebutuhan masyarakat melalui musrembang, forum PD juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pencapaian visi-misi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten maros, pencapaian sasaran dalam renstra PD, pencapaian SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2013 tahun 2006 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Satuan Polisi

Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.

Program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros di Tahun 2022 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2022.

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Rencana Startegis yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sesuai RPJP Daerah Kabupaten Maros, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros adalah sebagai pelaksana Sub Urusan Wajib Trantibumlinmas, setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Dalam Renja tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros merencanakan 3 (Tiga) program dan dijabarkan menjadi 10 (Sepuluh) kegiatan serta 31 (Tiga Puluh) Sub Kegiatan. Beberapa kegiatan dan sub kegiatan akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di Sekretariat di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel Renja PD Tahun 2022 terlampir.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
Dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Maros
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

KODE					TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023			
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.194.679.674					14.076.613.203	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.617.489.674					7.133.613.203	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.900.000	APB D				47.000.000	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di buat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	3 Dokumen	4.900.000	APB D		3 Dokumen	8.000.000		
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang dibuat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	1 Dokumen	2.500.000	APB D		1 Dokumen	5.000.000		
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang dibuat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	1 Dokumen	2.500.000	APB D		1 Dokumen	7.000.000		
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	Kab. Maros, Turikale,	1 Dokumen	2.500.000			1 Dokumen	5.000.000		

						yang dibuat	Pettuad e							
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang dibuat	Kab. Maros, Turikale, Pettuad e	1 Dokumen	2.500.000			1 Dokumen	7.000.000	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat	Kab. Maros, Turikale, Pettuad e	1 Dokumen	2.500.000			1 Dokumen	5.000.000	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Maros, Turikale, Pettuad e	6 Dokumen	7.500.000			6 Dokumen	10.000.000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.388.071.564			5.561.613.203	
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Pettuad e	1 Tahun	5.252.305.564	APB D		1 Tahun	5.383.613.203	
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Semua Kelurahan	11 Bulan	108.350.000	APB D		11 Bulan	120.000.000	
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Pelaksanaan Kegiatan	Kab. Maros, Turikale, Pettuad e	48 Dokumen	4.226.000	APB D		48 Dokumen	8.000.000	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AKHIR Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kab. Maros, Turikale, Pettuad e	1 Tahun	5.750.000	APB D		1 Tahun	15.000.000	

				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang dibuat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	6 Dokumen	8.610.000	APB D		6 Dokumen	20.000.000
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	12 Bulan	8.830.000	APB D		12 Bulan	15.000.000
1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					294.680.000				380.000.000
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah (Jenis) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	3 Jenis	189.680.000	APB D		3 Jenis	230.000.000
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	3 Jenis	105.000.000	APB D		3 Jenis	150.000.000
1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					356.238.110	APB D			525.000.000
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	7 Jenis	13.402.110	APB D		7 Jenis	20.000.000

				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	2 Jenis	80.000.000	APB D		2 Jenis	100.000.000	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	22 Jenis	13.648.000	APB D		22 Jenis	25.000.000	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	31 Jenis	53.040.000	APB D		31 Jenis	70.000.000	
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	5 Jenis	25.000.000	APB D		5 Jenis	30.000.000	
				07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan / Material yang Tersedia	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	10 Jenis	24.658.000	APB D		10 Jenis	30.000.000	
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitas Tamu	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	2 Jenis	226.490.000	APB D		2 Jenis	250.000.000	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					553.600.000	APB D			620.000.000
				02	Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	1 Jenis	10.000.000	APB D		1 Jenis	20.000.000	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan	4 Jenis	543.600.000	APB D		4 Jenis	600.000.000	

						Ketentrman dan Ketertiban							
				09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban dan Ketenraman Masyarakat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	8 Dokumen	3.400.000	APBD		8 Dokumen	5.000.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				32.026.000				40.000.000
				01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	3 Kali	14.487.000			3 Kali	20.000.000
				02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup	Kab. Maros, Semua Kecamatan dan Kelurahan	12 Kali	3.839.000			12 Kali	5.000.000
				03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelanggaran Perda / Perbup yang tertangani	Kab. Maros, Semua Kecamatan dan Kelurahan	20 Kasus	13.700.000			20 Kasus	15.000.000
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				27.449.000				30.000.000
				01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Apartur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	5 Orang	27.449.000			5 Orang	30.000.000

1	05	04			PROGRAM Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				1.840.130.000	APB D			2.577.00.000
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Bercun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.840.130.000				2.502.000.00
				01	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pencegahan Kebakaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	2 Kali	16.330.000			2 Kali	20.000.000
				02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan dan Kelurahan	250 Kejadian	1.815.100.000			250 Kejadian	2.472.000.000
				03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Maros, Semua Kecamatan dan Kelurahan	100 Kejadian	8.700.000			100 Kejadian	10.000.000
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				32.548.000	APB D			40.000.000
				01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Pemeriksaan) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang memadai	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	20 instansi / Perusahaan	15.548.000	APB D		20 instansi / Perusahaan	20.000.000
				02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Jenis) Sarana dan Prasarana Proteksi kebakaran dalam kondisi baik	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	32 Jenis	17.000.000	APB D		32 Jenis	20.000.000
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran				9.979.000				15.000.000

				01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	20 Kasus	9.979.000	APB D		20 Kasus	15.000.000
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				16.700.000	APB D			20.000.000
				01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi mengenai Pencegahan dan Penanggulan gan Kebakaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadane	200 Orang	16.700.000			200 Orang	20.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

TABEL BAB 4.1

RENCANA KERJA KEGIATAN DAN PENDANAAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KODE					TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	TOLAK UKUR	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.194.679.674			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			6.697.489.674			
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.900.000			
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang di buat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	3 Dokumen	4.900.000	APBD	
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Dokumen	2.500.000	APBD	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Kab Maros,Turikal	6 Dokumen	7.500.000	APBD	

						Perangkat Daerah yang disusun	e, Pettuadae	n				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.388.071.564	APBD		
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Tahun	5.252.305.564	APBD		
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	11 Bulan	108.350.000	APBD		
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen SPJ Pelaksanaan Kegiatan	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	48 Dokumen	4.226.000	APBD		
				05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	1 Tahun	5.750.000	APBD		
				07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD yang dibuat	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	6 Dokumen	8.610.000	APBD		
				08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	12 Bulan	8.830.000	APBD		
1	05	01	2.05		Administrasi Kependidikan dan Pelatihan Perangkat Daerah				294.680.000	APBD		
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah (Jenis) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	3 Jenis	189.680.000	APBD		
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Jenis Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	Kab Maros,Turikal e, Pettuadae	3 Jenis	105.000.000	APBD		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				436.238.110	APBD		

				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang dibeli	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	7 Jenis	13.402.110	APBD	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	2 Jenis	80.000.000	APBD	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Ruamah tangga	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	22 Jenis	13.648.000	APBD	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang dibeli	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	31 Jenis	53.040.000	APBD	
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	5 Jenis	25.000.000	APBD	
				07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan / Material yang Tersedia	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	10 Jenis	24.658.000	APBD	
				08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis Fasilitas Tamu	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	2 Jenis	226.490.000	APBD	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				553.600.000	APBD	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	Kab Maros,Turikale, Pettuadae	1 Jenis	10.000.000	APBD	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	Semua Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Kelurahan	4 Jenis	543.600.000	APBD	
1	05	02			Program Peningkatan Ketenraman dan Ketertiban Umum				3.927.833.000	APBD	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.868.358.000	APBD	
				01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	Jumlah Pelaksanaan	Kab Maros,Turikal	360 Kali	3.656.420.000	APBD	

					Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan (Patroli) Ketentraman dan Ketertiban Umum	e, Pettuadae				
				02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusushan massa	Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani	Kab Maros, Turikal e, Pettuadae	25 Kali	103.060.000	APBD	
				04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Anggota Sat.Linmas	Kab Maros, Turikal e, Pettuadae	3 Kali	15.000.000	APBD	
				05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Pelaksanaan Jambore Sat.Pol-PP Tingkat Provinsi	Kab Maros, Turikal e, Pettuadae	1 Kali	90.248.000	APBD	
				07	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknis Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Operasi Yustisi Dalam Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Kab Maros, Turikal e, Pettuadae	4 Kali	230.000	APBD	
				09	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Kab Maros, Turikal e, Pettuadae	8 Dokumen	3.400.000	APBD	
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota				32.026.000	APBD	
				01	Sosialisai Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perbup	Kab Maros, Turikal e, Pettuadae	3 Kali	14.487.000	APBD	
				02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan perturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	12 Kali	3.839.000	APBD	

						pelaksanaan Perda dan Perbup						
				03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pelanggaran Perda / Perbup yang tertangani	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	20 Kasus	13.700.000	APBD		
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				27.449.000	APBD		
				01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Apartur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	5 Orang	27.449.000	APBD		
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANAGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.899.357.000			APBD
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.840.130.000			APBD
				01	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi tentang Pencegahan Kebakaran	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	2 Kali	16.330.000	APBD		
				02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabuptaen/Kota	Terlaksananya Layanan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	250 Kejadian	1.815.100.000	APBD		
				03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kab. Maros Semua Kecamatan dan Kelurahan	100 Kejadian	8.700.000	APBD		
1	05	04	0.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				32.548.000	APBD		
				01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah (Pemeriksaan) Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran yang	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	20 instansi / Perusahaan	15.548.000	APBD		

				02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	memadai Jumlah (Jenis) Sarana dan Prasarana Proteksi kebakaran dalam kondisi baik	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	32 Jenis	17.000.000	APBD	
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran				9.979.000	APBD	
				01	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	20 Kasus	9.979.000	APBD	
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				16.700.000		APBD
				01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kab Maros, Turikale, Pettuadae	200 Orang	16.700.000	APBD	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros yang memuat Program dan Kegiatan Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan program dan kegiatan Tahun 2022 disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Maros pada tahun 2022 dapat tercapai.

Proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan-kegiatan melibatkan masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta berbagai elemen yang terkait untuk secara bersama dalam satu manajemen Program. Karena masyarakat adalah merupakan pelaku utama dan sekaligus penerima manfaat, maka pelibatannya dalam setiap tahapan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjadi sangat penting. Pelibatan tersebut diharapkan akan melahirkan tumbuhnya rasa memiliki dan dapat mendorong partisipasi masyarakat, sehingga peluang bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lebih terbuka.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholder, termasuk dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari Pemerintah Provinsi melalui dana APBD I serta dana Pusat (APBN) melalui Tugas Pembantuan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2022 merupakan penjabaran Tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang memuat Kerangka Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Maros beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Tahun 2023.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 ini dengan sebaik-baiknya;
- B. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- C. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar – seminar tentang perencanaan pembangunan;
- b. Substansi Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2019 dan Renstra Sat.Pol-PP dan Damkar;
- c. Tindak lanjut alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Sat.Pol-PP dan Damkar, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan;
- d. Bidang-bidang dalam semua unsur teknis pelaksana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, agar segera menyusun rencana Kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan;

- e. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam musrembang;
- f. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yang berimplikasi terhadap akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebagai antar ruang dan statistic dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Maros, 02 Juli 2021



Pt. KEPALA SATUAN,

TOWADENG, SH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19690328 199703 1 006